

BAB 1

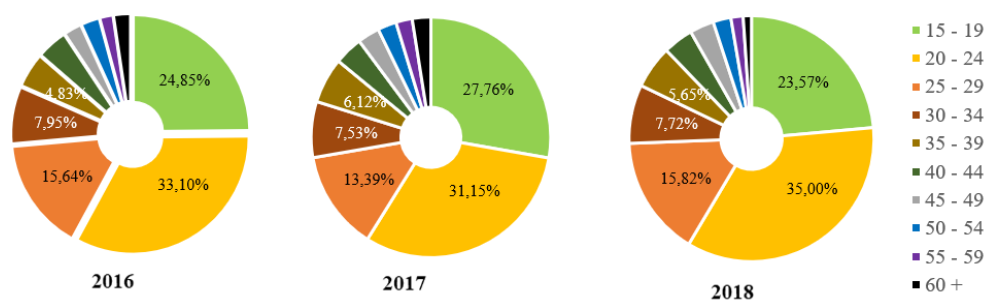
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam lima besar sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (United Nation, 2019a). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, penduduk Indonesia mencapai lebih dari 264 juta jiwa (BPS, 2018d:51). Angka ini meningkat lebih dari 2,8 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang semakin besar menjadi salah satu indikasi bahwa semakin besar pula penduduk yang masuk ke pasar tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencapaian bonus demografi yang telah berlangsung di Indonesia (World Bank, 2011).

Bonus demografi menggambarkan tingginya tingkat penawaran tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat proses transisi demografi karena penurunan fertilitas dan mortalitas dalam jangka panjang (Bloom *et al.*, 2011). Implikasinya adalah terjadi penurunan rasio ketergantungan akibat penurunan proporsi penduduk non produktif dan peningkatan penduduk usia kerja (Ross, 2004). Kondisi tersebut menyebabkan beban seseorang yang berada pada usia produktif dalam menanggung usia non produktif semakin kecil. Dalam literatur studi kependudukan disebutkan bahwa suatu daerah dianggap menikmati bonus demografi ketika *dependency ratio* berada di bawah 50%. Puncaknya, yaitu peluang untuk meraih bonus demografi terbesar di Indonesia diperkirakan berada di antara tahun 2020-2030, atau disebut periode *window of opportunity* (World Bank, 2011).

Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi sekitar tahun 2025 dimana rasio ketergantungan penduduk akan mencapai titik terendah yaitu 44,2 (BPS, 2012:42). Artinya, setiap 100 orang yang bekerja hanya akan menanggung sekitar 44 orang yang tidak bekerja. Bonus demografi merupakan keuntungan dari sisi demografi. Apabila dilihat dari sisi ketenagakerjaan, maka akan menjadi keuntungan apabila semua penduduk yang masuk dalam usia kerja berstatus bekerja (*full employment*). Sebaliknya, apabila penduduk usia kerja yang melimpah tidak dapat terserap dengan baik di pasar kerja, maka jumlah pengangguran akan meningkat. Oleh karena itu, mempertimbangkan karakteristik umur angkatan kerja menjadi penting dalam perencanaan di bidang ketenagakerjaan.

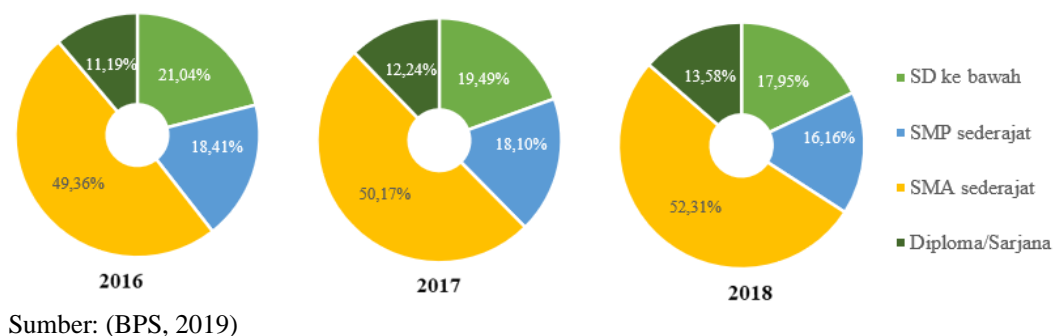


Sumber: BPS (2019)

Gambar 1.1. Pengangguran Menurut Kelompok Umur (tahun), 2016 - 2018

Berdasarkan data dari BPS (2019), pengangguran di Indonesia masih didominasi oleh penganggur usia muda. Hasil Sakernas Agustus menunjukkan penganggur pada kelompok usia (15-24 tahun) mencapai lebih dari setengah dari total pengangguran, yaitu sebesar 58,90 persen (2017) dan 58,57 persen (2018). Secara lebih luas, untuk penganggur pada kelompok usia 15-29 tahun jumlahnya mencapai 72,29 persen (2017) dan 74,39 persen (2018). Jumlah penganggur usia muda ini hampir mencapai tiga perempat dari total pengangguran.

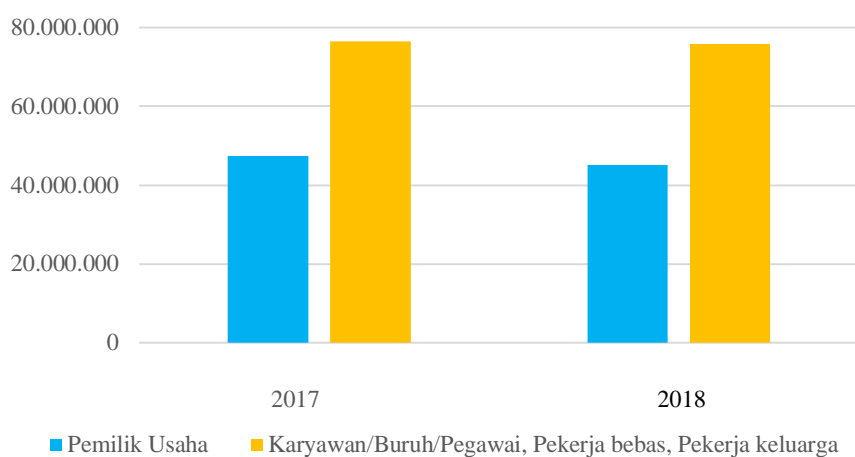
Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu masalah pembangunan yang kompleks. Dalam logika sederhana dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka peluang untuk menganggur semakin kecil. Namun, apabila peluang untuk masuk ke pasar tenaga kerja hanya dilihat dari hal tersebut maka akan sangat mudah untuk mengatasi pengangguran (Sukamdi, 1993). Data dari BPS menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia didominasi oleh angkatan kerja berijazah SMA/ sederajat dengan presentase yang cenderung meningkat, yaitu sebesar 50,17 persen (2017) dan 52,31 persen (2018). Hal ini memberikan gambaran bahwa penawaran tenaga kerja pendidikan menengah adalah yang paling banyak tidak terserap (BPS, 2018a).



Gambar 1.2. Pengangguran Menurut Pendidikan, 2016 - 2018

Pembahasan mengenai kualitas tenaga kerja sama halnya membahas tentang kualitas sumber daya manusia. Pembahasan tersebut mencakup manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk kelompok. Kemudian muncul pendapat bahwa seseorang bisa saja memilih untuk menunggu hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar pendidikan, wilayah, atau penghasilan yang akan diperoleh. (BPS, 2019) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingkat

pengangguran terbuka di daerah perkotaan mencapai 6,45 persen (2018) serta 6,79 persen (2017), nilai ini cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka di perdesaan yaitu 4,04 persen (2018) serta 4,01 persen (2017). Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki mencapai 5,40 persen (2018) serta 5,53 persen (2017), lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada perempuan yaitu 5,26 persen (2018) serta 5,44 persen (2017).

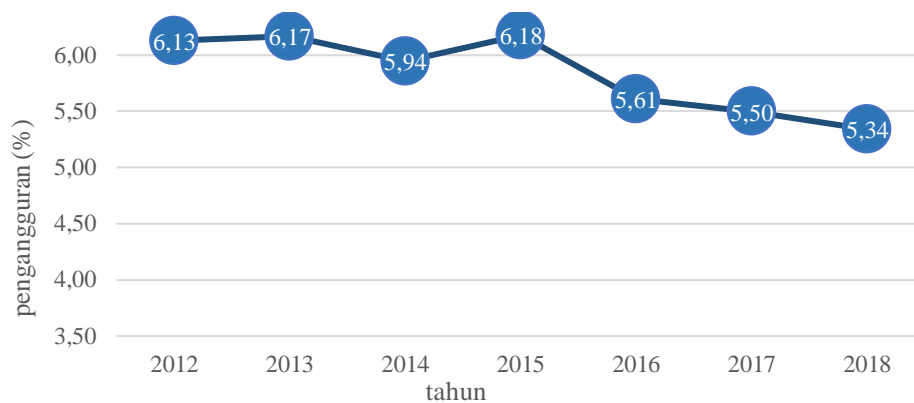


Sumber: (BPS, 2019)

Gambar 1.3. Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama (individu), 2017-2018

Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar penduduk yang bekerja berstatus sebagai karyawan/buruh/pegawai/pekerja bebas/pekerja keluarga. Proporsi penduduk yang berstatus sebagai karyawan/buruh/pegawai/pekerja bebas/pekerja keluarga tersebut mencapai 61,73 persen (2017) serta 62,71 persen (2018) dari seluruh penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bekerja sebagai pemilik usaha (berusaha sendiri/berusaha dibantu buruh tidak tetap/bekerja dibantu buruh tetap).

Pengangguran di Indonesia telah menjadi perhatian penting. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyebutkan bahwa pemerataan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana suatu wilayah dapat memaksimalkan potensi ekonomi hingga tercipta pertumbuhan inklusif. Dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan dapat menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (*Decent Work*). Hal ini selaras dengan salah satu tujuan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dimana, tujuan ke delapan SDGs adalah untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, yaitu diharapkan dapat diiringi dengan terbukanya kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (United Nation, 2019b).



Sumber: (BPS, 2019)

Gambar 1.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, 2012-2018

Tingkat pengangguran yang akan dicapai hingga akhir tahun 2019 dan tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah 4-5 persen (Perpres RI No.2 2015). Akan tetapi, dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia hingga tahun 2018 masih berada di atas 5 persen. BPS (2019) merilis tingkat pengangguran bulan Agustus sebesar 6,13 persen (2012)

dan 5,34 persen (2018). Artinya, telah terjadi penurunan angka pengangguran di Indonesia (Gambar 1.4 menunjukkan trend menurun). Meskipun demikian, nilai yang dicapai hingga akhir tahun 2018 belum sesuai dengan target yang diharapkan dalam RPJMN.

Perencanaan ketenagakerjaan merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi sebagaimana tertuang pada tujuan kedelapan dalam *SDGs*. Dalam kenyataannya, karakteristik pekerjaan serta karakteristik pekerja yang berbeda memungkinkan para penganggur untuk tidak menerima pekerjaan yang ditawarkan pertama kali. Hal tersebut menyebabkan durasi menganggur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, informasi terkait peluang serta durasi untuk mendapatkan pekerjaan diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat, khususnya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Studi empiris terkait durasi menganggur telah dilakukan di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu mengangkat topik mengenai durasi menganggur dan berfokus pada lama mencari kerja, artinya tidak melakukan klasifikasi apakah status bekerja yang akhirnya diperoleh adalah sebagai karyawan atau pemilik usaha. Di sisi lain, terdapat upaya-upaya yang berbeda antara penganggur yang mencari kerja dengan penganggur yang mempersiapkan usaha. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian terkait durasi mendapatkan pekerjaan dan mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu: durasi yang diperlukan penganggur dalam mencari kerja hingga menjadi seorang pegawai/karyawan serta durasi yang dibutuhkan penganggur untuk mempersiapkan usaha hingga menjadi seorang pemilik usaha.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah karakteristik sosial, demografi, serta regional berpengaruh terhadap lama mencari kerja di Indonesia?
2. Apakah karakteristik sosial, demografi, serta regional berpengaruh terhadap lama mempersiapkan usaha di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Pengaruh dari karakteristik sosial, demografi, serta regional terhadap lama mencari kerja di Indonesia
2. Pengaruh dari karakteristik sosial, demografi, serta regional terhadap lama mempersiapkan usaha di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang pemerintahan, yaitu memberikan masukan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan studi literatur untuk penelitian lain terkait lama mencari kerja dan lama mempersiapkan usaha.

1.5. Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengangkat isu penting tentang durasi yang dibutuhkan untuk beralih status dari pengangguran menjadi bekerja dengan Analisis Survival. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Cox. Sumber data berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018

dari Badan Pusat Statistik. Cakupan sampel tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

1.6. Sistematika Tesis

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- 1) Bab 1 Pendahuluan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, serta sistematika penelitian.
- 2) Bab 2 Tinjauan Pustaka memuat tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian dan model analisis.
- 3) Bab 3 Metode Penelitian merupakan penjelasan dari jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengolahan data mikro, teknis analisis data, serta kriteria pengujian hipotesis.
- 4) Bab 4 Hasil dan Pembahasan terkait lama mencari kerja dan lama mempersiapkan usaha
- 5) Bab 5 Penutup memuat simpulan, implikasi dan kebijakan, serta keterbatasan penelitian dan arah bagi penelitian selanjutnya.